RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
JL.PROF.RI.GONDOWARDOYO,SH NO.12 NGANJUK - 64418
TELP. (0358) 321376,323102 Faks.(0358) 321376 Email: disperindag@ nganjukkab.go.id



K A T A P E N G A N T A R

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rakhmat dan hidayahnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dapat menyelesaikan Rancangan akhir arah kebijakan perencanaan pembangunan pasca berakhirnya RPJMD 2018-2023

Semoga dengan telah tersusunnya Rancangan akhir arah kebijakan perencanaan pembangunan pasca berakhirnya RPJMD 2018-2023 ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pejabat struktural, fungsional dan staf dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk terwujudnya penyusunan Rancangan akhir arah kebijakan perencanaan pembangunan pasca berakhirnya RPJMD 2018-2023

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya dan agar dapat digunakan dengan sebaik - baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan perubahan Rencana strategis dimasa yang akan datang.

NGANJUK, APRIL 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN NGANJUK



HARIS JATMIKO,S.PD,M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711219 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR.....		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN	10
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
	2.2 Sumber Daya	15
	2.3 Kinerja Pelayanan	17
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	27
BABIII	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	29
	3.1 Permasalahan	29
	3.2 Isu-Isu Strategis.....	30
BABIV	TUJUAN DAN SASARAN	31
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BABVI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ..	72
BAB VIII	PENUTUP	83
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL	2.1	Data administrasi Kepegawaian menurut Golongan dan Jabatan	16
TABEL	2.2	Data Administrasi menurut tingkat pendidikan	16
TABEL	2.3	Perkembangan Usaha Industri Pada tahun 2016-2021	23
TABEL	2.4	Nilai Ekspor	20
TABEL	2.5	Ruang Lingkup dan Daftar Standart yang dimiliki	20
TABEL	2.6	Jumlah UTTP.....	21
TABEL	2.7	Retribusi Pelayanan Pasar.....	22
TABEL	2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan	23
TABEL	2.9	Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan	24
TABEL	3.1	Masalah Pokok, masalah dan akar masalah	26
TABEL	4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	33
TABEL	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
TABEL	6.1	Program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebelum Perubahan	42
TABEL	7.1	Indikator Kinerja Utama.....	74
TABEL	7.2	Indikator KinerjaKunci.....	78

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	3
GAMBAR	2.1	Bagan Susunan Organisasi	11
GAMBAR	4.1	Keterkaitan RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026	32
GAMBAR	4.2	Kerangka Logis	34
GAMBAR	4.3	Cascading Kinerja	35
GAMBAR	4.4	Peta Proses Bisnis	36

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

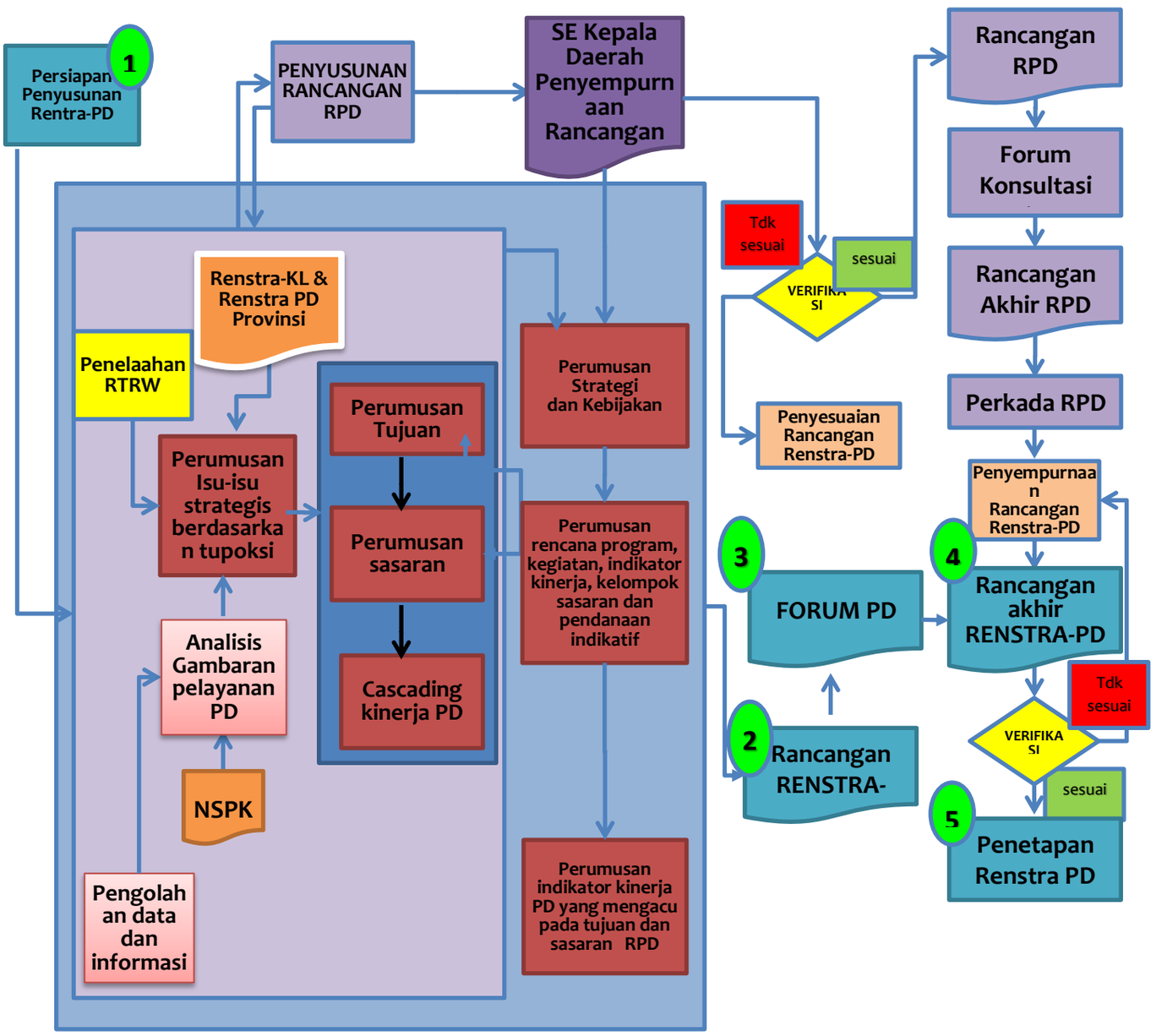
Dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagnagan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk memperhatikan : (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
8. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat- syarat bagi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3283 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 46 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 199 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4020) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 103 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4126);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang izin usaha industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 329 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5797);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
41. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
42. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
c. Memberikan pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dalam penyusunan Renja PD;

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Isu Strategis; dan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
- 4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
- 6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
- 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 TUGAS POKOK, FUNSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

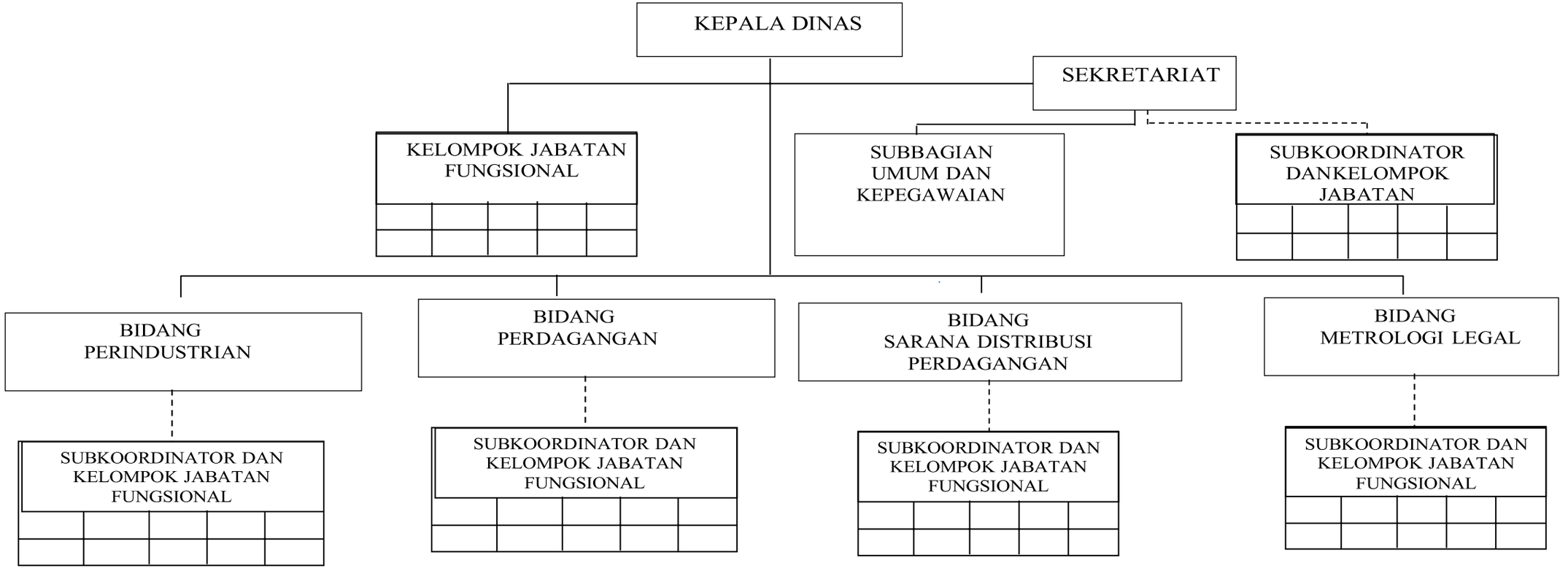
Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2020 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 Tanggal 22 Maret tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSIDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



I. TUGAS POKOK

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

II. FUNGSI

Dinas Perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;

g. pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah;
h. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
i. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
j. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan,membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten;
b. pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
c. pelaksanaan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan di bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
b. pelaksanaan penerbitan tanda daftar gudang;
c. pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
d. pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
e. pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
f. pelaksanaan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten;
g. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
h. pelaksanaan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
i. pelaksanaan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
j. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten;
k. pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten;
l. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan,membina,mengawasi,mengembangkan,

evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang sarana distribusi perdagangan.

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
b. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Metrologi Legal

Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengembangkan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pelayanan umum di bidang metrologi legal.

Bidang Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan metrologi legal, berupa teradan tera ulang;
b. pelaksanaan pengawasan, penyuluhan dan penyidikan metrologi legal; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk per desember Tahun 2022 sebanyak 75 orang.

Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah

Tabel 2.1
Data Administrasi Kepegawaian
Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N	Satuan	JENIS KELAMIN		Jumlah
a. Jumlah PNS		P	L	
1) Golongan I	Orang		2	2
2) Golongan II	Orang	10	34	44
3) Golongan III	Orang	11	11	22
4) Golongan IV	Orang	4	3	7
Jumlah	**Orang**	**25**	**50**	**75**
b. Jumlah Pejabat Struktural				
1) Eselon II	Orang	-	1	1
2) Eselon III	Orang	3	2	5
3) Eselon IV	Orang	1	-	1
c. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	7	7	14
d. Jumlah Staf PNS	Orang	14	40	54
Jumlah	Orang	**25**	**50**	**75**

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

Tabel 2.2

Tabel Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No.	U R A I A N	Satuan	Jumlah	DATA PILAH	
				P	L
1	Lulusan SD	Orang	2	-	2
2	Lulusan SLTP	Orang	2	-	2
3	Lulusan SLTA	Orang	38	10	28
4	Lulusan Paket C	Orang	4	-	4
5	Lulusan KPAA	Orang	1	-	1
4	Lulusan D2	Orang	-	-	-
5	Lulusan Sarjana Muda/ D3	Orang	1	1	-
6	Lulusan S-1	Orang	19	9	10
7	Llusan Pasca Sarjana/ S.2	Orang	8	5	3
8	Lulusan Pasca Sarjana/ S.3	Orang	-	-	-
Jumlah		**Orang**	**75**	**25**	**50**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Nganjuk menempati gedung dengan Luas bangunan yang 1.414 m^2 dan 1 gedung untuk pertemuan seluas 280m^2, Gedung tersebut masih kurang memadai karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk juga memberikan pelayanan kemetrologian dan pasar yang membutuhkan tempat untuk menyimpan peralatan dan karcis retribusi pasar. kondisi ini belum cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat membutuhkan pelayanan dan koordinasi, Namun demikian masih diperlukan adanya tambahan prasarana seperti komputer dan printer serta Laptop yang saat ini belum mencukupi dengan beban tugas yang ada Sedangkan untuk mobilitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, mobil dinas roda 4 (Empat) yang ada sebanyak 3 (Tiga) unit dengan kondisi 1 (Satu) unit dalam keadaan baik dan 2 (Dua) unit dalam keadaan kurang layak/rusak sehingga perlu adanya penggantian mobil yang baru, Prasarana Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor yang ada sebanyak 8(Delapan) unit, yang 5 unit dalam keadaan baik dan 3 dalam keadaan kurang layak, Kendaraan Roda 3 sejumlah 3 dalam keadaan kurang layak/rusak sehingga untuk memperlancar tugas-tugas di lapangan sehingga masih terasa sangat kurang sesuai dengan tuntutan tugas dan luas wilayah. Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana Daerah yang bersifat fisik. Tercukupinya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor industri dan perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Nganjuk Untuk itu peran industri dalam perekonomian adalah dengan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sector pertanian haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

A. BIDANG PERINDUSTRIAN

Pembinaan dan pengembangan di bidang industri yang dilakukan adalah kepada industri formal (industri yang telah memiliki legalitas usaha / ijin usaha industri) serta kepada industri non formal (industri rumah tangga yang tumbuh dari kelompok usaha maupun perorangan dan belum memiliki legalitas usaha / ijin usaha industri

1. Perkembangan Industri

   Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumahtangga) di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil yang memiliki legalitas usaha. Demikian pula dengan industri kecil semakin berkembang menjadi industri menengah dan besar dengan dimilikinya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI). Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian NOMOR 41/MIND/PER/6/2008. Melalui beberapa program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Perkembangan usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel 2.3 terlampir .

Tabel 2.3

Perkembangan Usaha Industri Pada tahun 2016 – 2021

Jenis Data								Satuan
a. Industri Non Formal								
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Unit Usaha	15.375	15.836	16.085	15.998	16.052	16.216	Unit
2.	Tenaga Kerja	44.052	47.796,42	48.545	44.192	44.236	44.687	Orang
3.	Nilai Produksi	1.886.177.568.000	2.112.518.876.160	2.146.577.825.982	1.904.350.567.798	1.904.388.067.798	1.923.812.826.090	Rupiah
4	Nilai Investasi	19.280.279.000	21.015.504.110	21.353.347.738	19.381.203.084	19.383.204.087	19.580.912.769	Rupiah
b. Industri Formal								
1	Unit Usaha	1.216	1.252	1.272	1.294	1.316	1.329	Unit
2	Tenaga Kerja	17.518	19.007,03	19.307	17.658	17.702	17.883	Orang
3	Nilai Produksi	2.999.539.600.000	3.359.484.352.000	3.413.932.732.384	3.000.849.858.450	3.000.868.958.450	3.031.477.821.826	Rupiah
4	Nilai Investasi	72.257.966.000	78.761.182.940	80.036.116.238	71.423.258.069	71.423.258.068	72.151.775.300	Rupiah

B. BIDANG PERDAGANGAN

Perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data nilai ekspor di bidang perdagangan tahun 2017-2021 seperti pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Nilai Ekspor

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Ekspor	18.378.023.595	53.600.565.329	43.980.029.708	38.640.852.988	50.100.000.000

C. BIDANG METROLOGI LEGAL

Dengan terbitnya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Nomor : 56/PKTN/KKPTTU/08/2018 dan berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, maka Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mampu melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai lingkup :

1) Meter Kayu, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, Anak Timbangan dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak ;
2) Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP meliputi :

Tabel 2.5
RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDRAT YANG DIMILIKI

NO	RINCIAN UTTP	PERALATAN DAN STANDART UKURAN YANG DIMILIKI /DIGUNAKAN
1	Meter Kayu	Komparator sidang 1m / 1m
2	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII (Termasuk Timbangan Jembatan Maksimum Kapasitas 5 Ton)	- Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g) - Anak Timbangan Kelas M2 (2 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (5 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (10 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (20 Kg) - Anak Timbangan Lemping sampai dengan 110 kg - Anak Timbangan Bidur M2 20kg (25 buah)

3	Timbangan Pegas	
4	Timbangan Cepat	
5	Timbangan Cepat Meja	
6	Neraca	
7	Dacin	
8	Timbangan Milisimal	
9	Timbangan Sentisimal	
10	Timbangan Desimal	
11	Timbangan Bobot Ingsut	
12	Timbangan Meja Beranger	
13	Anak Timbangan sebagai Perlengkapan Timbangan Neraca, dan Meja	- Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.01 g - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.001g
14	Pompa Ukur BBM	- Bejana ukur 5L, 10L, 20L - Gelas ukur 1000ml/10ml - penyipat datar - Landasan bejana ukur - Stopwatch - termometer

Adapun Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah UTTP

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah UTTP	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

D. BIDANG SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, peningkatan manajemen pengelolaan pasar dan Pembinaan pedagang di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan. Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya balik nama dan perpanjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedag tepi/ luar, bedag dalam Los, dibawah los, pelataran, Penitipan Kendaraan serta Ternak dalam Pasar. Adapun data tentang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Retribusi Pelayanan Pasar

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bedag tepi /luar	Rp	1.689.603.312,30	1.618.328.368,98	1.442.091.968,82	1.473.576.036,82	1.165.231.475,67	1.598.342.153,80
2	Bedag dalam	Rp	596.325.450,00	598.129.100,00	588.881.050,00	757.905.200,00	538.914.661,00	736.691.800,00
3	Bedag dalam los	Rp	759.775.350,00	730.289.050,00	651.276.300,00	678.263.200,00	491.850.900,00	615.613.400,00
4	Di bawah Los	Rp	549.228.300,00	557.999.700,00	581.026.200,00	663.931.800,00	495.770.220,00	689.486.000,00
5	Pelataran	Rp	147.500.400,00	187.986.950,00	160.857.100,00	162.293.500,00	127.723.150,00	178.237.200,00
6	Ijin tempat	Rp	266.080.727,55	268.059.185,81	238.329.625,00	239.424.496,16	245.169.334,48	256.731.475,76
7	Penitipan kendaraan	Rp	139.963.000,00	149.416.500,00	147.689.170,00	152.944.500,00	116.375.000,00	172.444.000,00
8	Ternak	Rp	50.076.000,00	51.359.500,00	56.581.000,00	60.811.000,00	47.832.500,00	64.899.000,00
9	BBN (Bea Balik Nama)	Rp	126.648.888,00	84.001.815,00	73.772.252,00	43.770.692,50	16.739.306,00	46.376.060,00

TABEL 2.8 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2019-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PERINDUSTRIAN											
1	Persentase IKM yang terstandarisasi	18,50	18,90	19,60	20,30	21,06	18,13	19,14	19,67	98,00	101,27	100,36
2	Persentase Peningkatan Usaha Industri	1,67	1,77	1,87	1,97	2,00	1,62	1,70	1,97	97,01	96,05	105,35
3	Persentase Peningkatan IKM berbasis Produk Lokal	6,16	6,28	6,38	6,48	6,58	6,20	5,51	6,55	100,65	87,74	101,08
II	PERDAGANGAN											
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,76	5,78	5,80	5,82	5,84	5,70	5,69	5,82	98,96	98,44	100,34
2	Nilai Ekspor	45	47	49	51	53	48	38	50,1	106,67	80,85	102,24

TABEL 2.9

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2019-2021

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	757.250.000	633.966.960		642.554.725	598.169.545		84,85	94,35	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	448.689.900	198.729.731		407.582.817	195.342.812		90,84	98,30	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.700.000	36.200.000		42.762.500	35.982.000		93,57	99,40	
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.044.000	22.708.000		22.821.550	21.034.900		94,92	92,63	
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	540.000.000	634.411.000		484.606.310	569.689.770		89,74	89,80	
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	500.000.000	100.000.000		270.966.000	86.146.550		54,19	86,15	
7	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	100.000.000			82.426.000			82,43		
8	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	95.000.000			81.098.300			85,37		
9	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	501.517.800	397.400.050		464.616.787	363.768.155		92,64	91,54	
10	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.532.650.000	793.862.100		1.357.043.613	725.891.028		88,54	91,44	
11	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	30.000.000			23.680.300			78,93		
12	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan	313.675.000			276.615.850			88,19		
13	Program Pengembangan Pemasaran	619.269.900			575.090.575			92,87		
14	Program Pembinaan Industri	500.000.000	150.000.000		421.773.948	110.807.250		84,35	73,87	
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	4.721.832.000			4.364.421.744			92,43		
16	Program Pengembangan Pasar		3.827.590.050			3.692.088.999,79			96,46	
17	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal (DBHCHT)		150.000.000			139.740.500			93,16	
18	Program Penunjang Urusan			10.703.022.390			8.729.170.516			81,56

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
19	Progam perencanaan dan pembangunan industry			467.410.950			302.512.256			64,72
20	Program pengendalian izin usaha industry			51.544.300			39.273.000			76,19
21	Progam pengelola sistem informasi industri nasional			70.305.000			63.206.000			89,90
22	Progam perizinan dan pendaftaran perusahaan			50.522.000			28.604.500			56,62
23	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan			3.393.608.060			3.224.361.560			95,01
24	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			56.399.900			38.445.350			68,17
25	Program standardisasi dan perlindungan konsumen			205.810.000			190.282.090			92,46
26	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negri			99.994.750			96.046.432			96,05

Berdasarkan hasil capaian pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

A. Urusan Perindustrian

Capaian Kinerja urusan Perindustrian diukur dengan Sasaran Meningkatnya Sektor Industri yang Berdaya Saing dengan indikator sasaran yaitu Persentase Industri Kecil Menengah yang terstandarisasi, Persentase Pertumbuhan Usaha Industri dan Persentase Pertumbuhan IKM berbasis produk lokal. Capaian Kinerja urusan Perindustrian tahun 2019-2021 termasuk dalam kategori tercapai atau baik hal ini disebabkan karena banyaknya Industri Kecil menengah yang beralih pada produksi makanan dan minuman untuk berlangsungnya kehidupan sehari-hari serta Industri Kecil dan Menengah mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa penguatan modal sehingga meskipun omzetnya turun dapat bangkit lagi dan berproduksi lagi. Hal ini didukung oleh semakin sadarnya Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menjadi semakin berstandar. Hal ini terlihat dari antusiasnya para pelaku IKM dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Disperindag, seperti fasilitasi HAKI berupa merk, serta peningkatan ketrampilan untuk memperbaiki produk-produk mereka melalui berbagai pelatihan yang diadakan dan difasilitasi oleh Disperindag. Dengan semakin berstandarnya produk-produk IKM dan makin beragam hasil produk-produknya maka industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat meningkatkan daya saing di pasaran yang akhirnya juga dapat meningkatkan Pertumbuhan usaha industri. Selain itu dengan inovasi-inovasi yang diperoleh lewat pelatihan dan fasilitasi dapat meningkatkan potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru yang mempunyai berbagai terobosan yang dapat meningkatkan daya saing

B. Urusan Perdagangan

Sasaran Meningkatnya sector Perdagangan yang berdaya saing untuk menilai sasaran keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indicator Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan dan nilai Ekspor. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya sector Perdagangan yang berdaya saing tahun 2019-2021 termasuk dalam kategori tercapai atau baik hal ini disebabkan karena adanya Pembinaan dan Pendampingan serta pemberian bantuan modal kepada para pedagang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. mengingat pada tahun 2020 ini terdapat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak begitu luas terutama pada sektor perekonomian.

Meskipun pandemi COVID-19 masih belum usai, namun perlahan para pelaku usaha mencoba bangkit dan menggerakkan roda perekonomian.

Untuk Evaluasi Pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2013 dapat dilihat pada tabel 2.10 Terlampir

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Tantangan

1. **Terkait dengan Lingkungan**

   Perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta meningkatnya globalisasi, Diharapakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi outcome/impact dari suatu kebijakan

2. **Terkait Data Dan Informasi**

   Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan.
   Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan memiliki data dan informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir.

3. **Terkait Kapasitas Kebijakan**

   Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap outcome/impact dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program mendasarkan pencapaian outcome/impact.

2.4.2. Peluang

a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi Publik
b. Adanya keterbukaan kerjasama dengan pihak lain baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota/ Kabupaten lain, swasta, lembaga donor, LSM dan lembaga-lembaga lain untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program
c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar

d. Jumlah penduduk, pelaku usaha, sumber daya alam untuk dikembangkan,
e. Ketahanan Pelaku Usaha Kecil dan menengah terhadap krisis ekonomi relative cukup kuat karena kemandirian pelaku usaha
f. Kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1 PERMASALAHAN

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih Rendahnya daya saing industri	Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensi lokal	Kurangnya kesadaran sumber daya manusia pelaku usaha
		Masih rendahnya kualitas produk dan standarisasi produk	Manajemen usaha dan Peralatan yang masih tradisional
2	Jumlah Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dilayani belum maksimal	1. Masih rendahnya kepatuhan pemilik UTTP dalam melakukan tera/tera ulang sebagai wujud dari perlindungan konsumen . 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanan tera /tera belum memadai. 3. Pengawasan pada UTTP yang sudah di tera/tera ulang dan BDKT yang sesuai dengan aturan masih belum optimal	1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tera/tera ulang. 2. Tidak memadainya sarana berupa mobil layanan tera/tera ulang. 3. Tidak adanya tenaga pengawas yang sudah bersertifikat
3	Penataan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	1. Sarana dan Prasarana distribusi Perdagangan belum memadai 2. Belum optimalnya Pengelolaan Pembayaran Retribusi	Tidak memadainya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Pengelolaan Pembayaran Retribusi Belum dilaksanakan Secara

		3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang	Elektronik Pengelolaan masih dilaksanakan secara tradisional
4	Harga ditentukan Pedagang/pasar	Belum dapat menstabilisasi harga barang pokok dan barang Penting	Belum Optimalnya Pelaksanaan Operasi Pasar
5	Belum siapnya Produk yang siap diekspor	Kreteria Produk belum memenuhi syarat	Belum Profesionalnya Pelaku Usaha
6	Belum Optimalnya Penataan toko modern	Sudah adanya Pelaku Usaha yang sudah beroperasional sesuai dengan peraturan	Tidak berkembangnya pasar rakyat karena Belum Optimalnya Penertiban berdirinya toko modern

3.2 ISU STRATEGIS

1. Peningkatan daya Saing Industri
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan
3. Rendahnya Kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi atas produk yang dihasilkan
4. Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri
6. Belum optimalnya Pemberdayaan eksportir, importer dan perizinan terhadap perdagangan dan peningkatan produk
7. Belum tertibnya Penataan toko modern
8. Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera/tera ulang
9. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pasar rakyat
10. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan tehadap peran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Adapun tujuan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah :

"Meningkatnya Produktifitas sektor Industri dan perdagangan"

Dengan indikator kinerja

1. Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Industri
2. Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri
   dengan Indicator sasaran :
   1. Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
2. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan indicator sasaran :
   1. Persentase Peningkatan omzet sektor Perdagangan

Keterkaitan Keterkaitan RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Gambar 4.1 sedangkan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024- 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1

Gambar 4.1

Keterkaitan RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026



Tabel. 4.1
TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

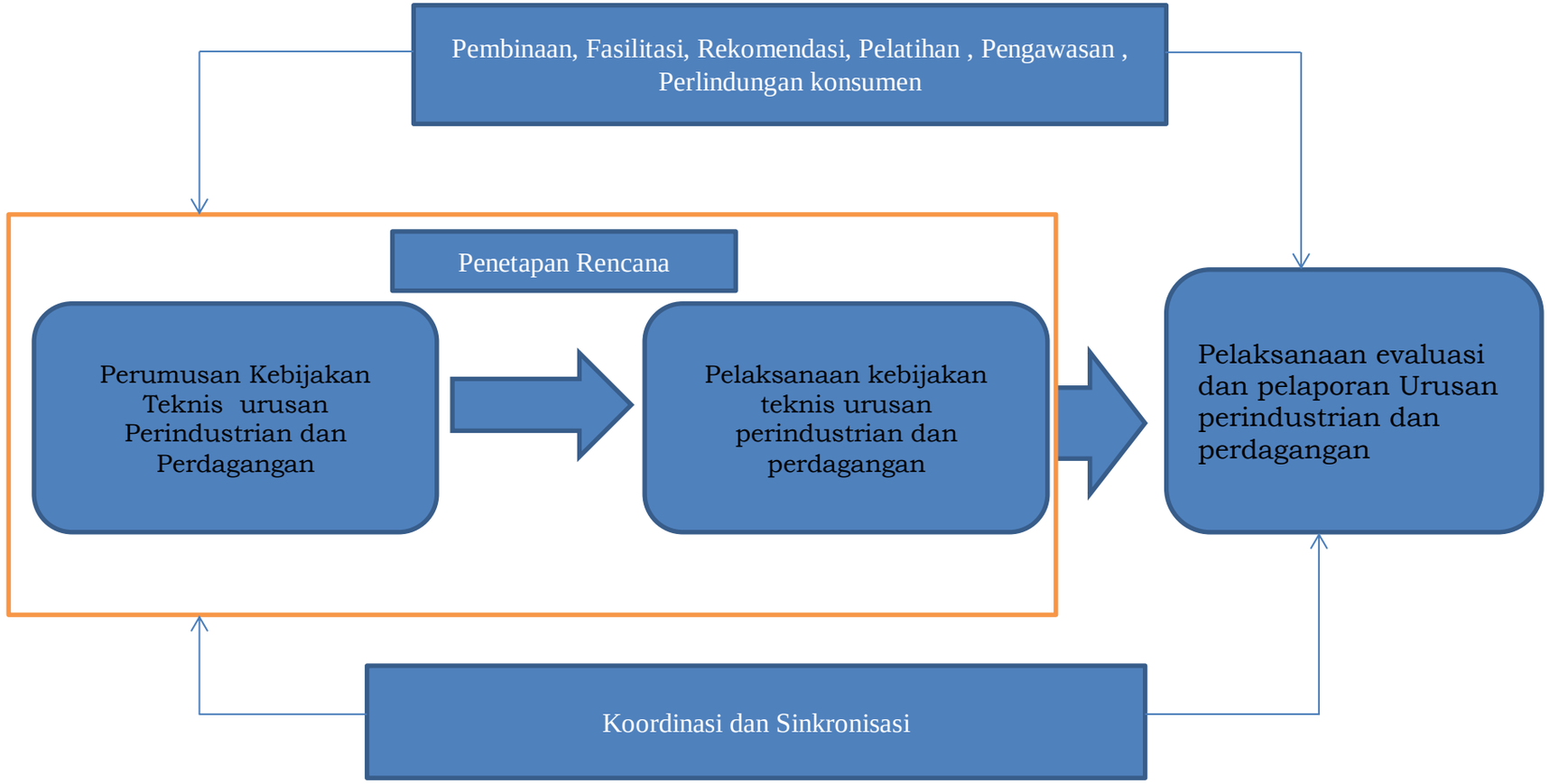
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
							2022	2024	2025	2026	
1				2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produktivitas sektor industri dan perdagangan			Pertumbuhan PDRB(ADHK) sektor industri	PDRB (ADHK) sektor Industri Tahun N-Tahun N-1 x100 PDRB (ADHK) sektor Industri Tahun N-1	%	11,70	11,80	11,90	12,00	12,00
				Pertumbuhan PDRB(ADHK) sektor Perdagangan	PDRB (ADHK) sektor Perdagangan Tahun N-Tahun N-1 x100 PDRB (ADHK) sektor Perdagangan Tahun N-1	%	5,30	5,40	5,50	5,60	5,60
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N _tahun (N-1) x100 Jumlah industri kecil dan menengah tahun (N-1)	%	1,97%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	2	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	Omzet sektor perdagangan tahun N – tahun (N-1) x100 Omzet Sektor Perdagangan Tahun (N-1)	%	6,0%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%

4.3 Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis;

1. Kerangka Logis

Gambar 4.2

Kerangka Logis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

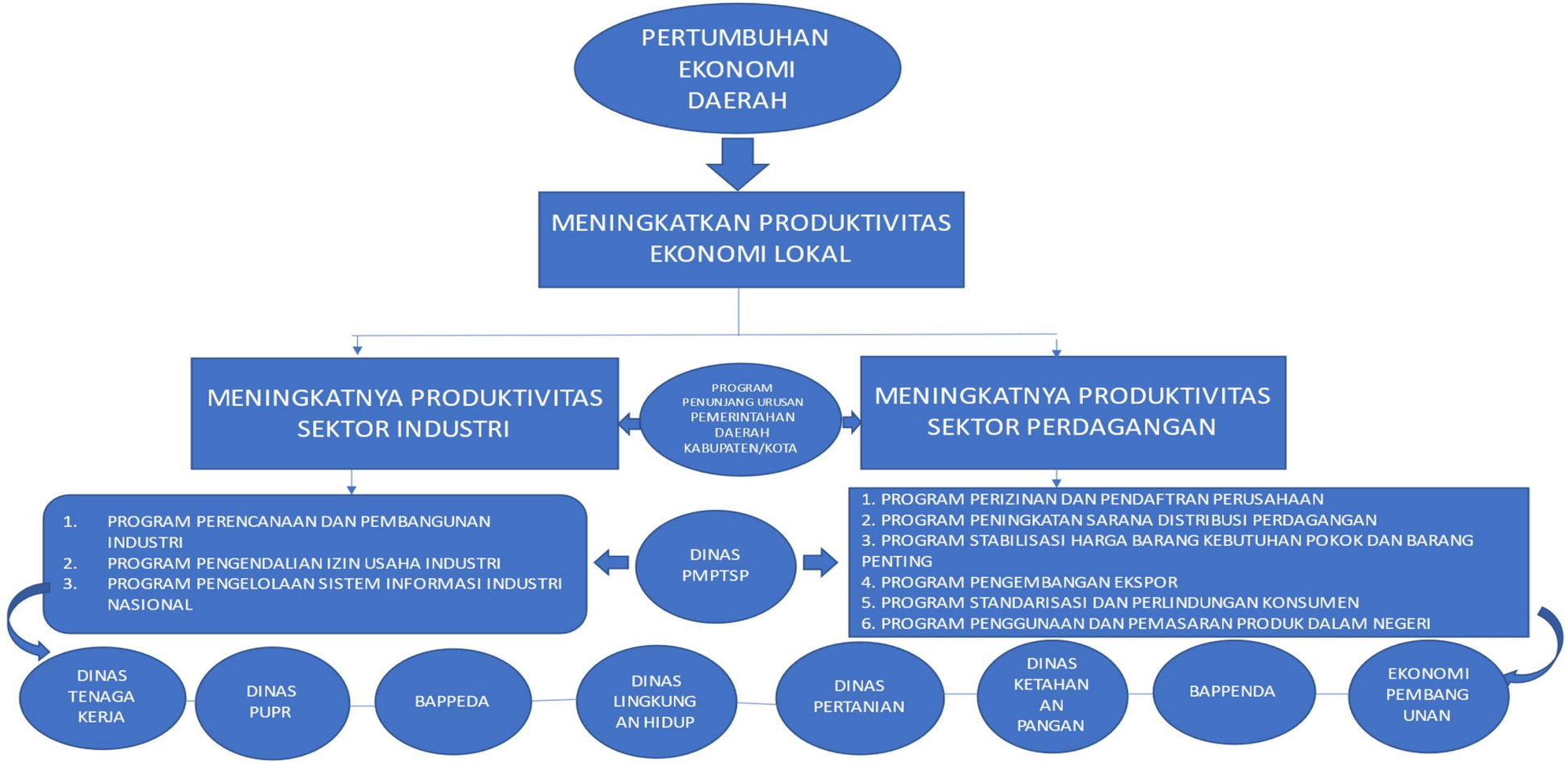


2. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah dapat dilihat pada tabel 4.3 terlampir

3. Crosscutting Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Crosscutting Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :



4. Peta Proses Bisnis

Gambar 4.4
Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai *(strategy objective)*. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi *(learning process)*.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Rumusan Pernyataan Tujuan,Sasaran,strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang pada tabel 5.1 berikut

TABEL 5.1
TUJUAN.SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ADALAH " NGANJUK TUMBUH".
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Sasaran 1 : Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal
Indikator Sasaran : 1. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

NO	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*		*3*		*4*		*5*
1	Meningkatnya Produktivitas sektor Industri dan Perdagangan	1	Meningkatkan Pertumbuhan sektor Industri		Memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,	1	Mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi khususnya dalam manajemen adiministratif
						2	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengacu pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018
						3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Pubik
		2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor Industri	1	Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan Peningkatan Daya saing produk Industri Kecil Menengah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk	1	Membina dan memfasilitasi usaha industri kecil dan menengah (IKM) dalam rangka pengembangan industri
				3	Meningkatkan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas,konsultasi dan informasi bagi industry (utamanya industri kecil) dan perdaganganuntuk memperluas akses pasar dan daya saing		

NO	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*		*3*		*4*		*5*
				4	Mengembangkan sentra-sentra industri potensial,		
		2	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1.	Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Perlindungan, Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	1	Menggandeng Mitra Usaha Besar agar mau bersinergi dan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan
				2.	Menyusun Data base Pelaku Usaha di Kabupaten Nganjuk	2	Meningkatkan perdagangan yang berkeadilan, efisien dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus distribusi, perlindungan kepentingan konsumen dan produsen.
				3.	Penyediaan layanan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pihak-pihak yang membutuhkan serta berpartisipasi aktif dalam pameran-pameran		
				6.	Meningkatkan ketertiban, Kebersihan dan keindahan pasar dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai, penataan pedagang serta data yang akurat dan valid	3	Meningkatkan Pelayanan terhadap pemakai jasa pasar
				7.	Penataan pedagang yang berbasis pada data yang akurat dan valid		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 BIDANG PERINDUSTRIAN

6.1.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan menengah Melalui Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri, fasilitasi sarana dan Prasarana bagi Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat

6.1.2 Program Pengendalian Izin usaha Industri

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis SIINAS

6.1.3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI melalui Pengumpulan, Pengolahan, analisis Data Industri, Diseminasi dan Publikasi data informasi serta Pemantaun dan Evaluasi kepatuhan Industri

6.2 BIDANG PERDAGANGAN

6.2.1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase fasilitasi izin Penerbitan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Penerbitan Surat izin

usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C serta Pengendalian fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan

6.2.2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan serta Pembinaan, Pengendalian dan Pemberdayaan pengelola sarana Distribusi Perdagangan

6.2.3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Pengawasan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaa, PengendalianHarga dan Stok barang kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya serta Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi.

6.2.4 Program Pengembangan Ekspor

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Peningkatan fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor melalui Penyelenggaraan promosi dagang, pameran dagang, misi dagang dan pembinaan bagi pelaku ekspor.

6.2.5 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Alat - alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku serta Pengawasan/penyuluhan metrologi legal .

6.2.6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri. Melalui Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Secara rinci program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 tertuang pada Lampiran 6.1

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan		Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Industri									11,70%	11,80%		11,90 %		12,00 %		12,00%			
		Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan									5,30%	5,40%		5,50%		5,60%		5,60%			
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah									1,97%	2,1%		2,2%		2,3%		2,3%			
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan									6,0%	6,1%		6,2%		6,3%		6,3%			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Urusan Pilihan Perindustrian													
			3	**31**	**01**			**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP DISPERINDAG		85 Nilai	85,20 Nilai	12.278.232.059	85,30 Nilai	13.750.660.786	85,40 Nilai	14.227.424.606	85,40 Nilai	14.207.424.606		
			01	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	17 Dokumen	110.000.000	17 Dokumen	125.000.000	18 Dokumen	140.000.000	18 Dokumen	140.000.000		
			01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	55.000.000	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	60.000.000		
			01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000		
			01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
			01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
			01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	35.000.000		
			01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000		
			01	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104 Dokumen	104 Dokumen	9.480.597.059	104 Dokumen	9.716.660.786	104 Dokumen	9.959.424.606	104 Dokumen	9.959.424.606		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang	75 orang	9.376.149.059	75 orang	9.610.552.786	75 orang	9.850.816.606	75 orang	9.850.816.606		
			01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
			01	01	2.02	03		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		jumlah dokumen penata usahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	50.040.000	60 Dokumen	51.000.000	60 Dokumen	52.000.000	60 Dokumen	52.000.000		
			01	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
			01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.608.000	1 Laporan	6.108.000	1 Laporan	6.608.000	1 Laporan	6.608.000		
			01	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	25 Laporan	25 Laporan	44.800.000	25 Laporan	45.000.000	25 Laporan	46.000.000	25 Laporan	46.000.000		
			01	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		jumlah dokumen pelaporan dan analisis pronogsis realisasi anggaaran	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000		
			01	**01**	**2.03**			**Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**		Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				**1 Dokumen**	**15.000.000**	**1 Dokumen**	**19.400.000**	**1 Dokumen**	**19.400.000**		
			01	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD				1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000		
			01	01	2.03	6		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	14.400.000	1 Laporan	14.400.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Dokumen	**200.000.000**	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000		
			01	01	2.05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		2Unit	50.000.000	2Unit	50.000.000	2Unit	50.000.000	2Unit	50.000.000		
			01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		85 Paket	50.000.000	85 Paket	50.000.000	85 Paket	50.000.000	85 Paket	50.000.000		
			01	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		
			01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		1 Dokumen	50.000.000	85 Pegawai	100.000.000	85 Pegawai	100.000.000	85 Pegawai	100.000.000		
			01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000		
			01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01	01	02	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		4Dokumen	476.135.000	4 Dokumen	636.000.000	4 Dokumen	639.300.000	4 Dokumen	639.300.000		
			01	01	02.06	01		Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah paket komponen intalasi listrik/penenrangan bangunan kantor yang disediakan		50 Paket Komponen	6.000.000	50 Paket Komponen	3.000.000	50 Paket Komponen	3.500.000	50 Paket Komponen	3.500.000		
			01	01	02.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000		
			01	01	02.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah tangga		jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000		
			01	01	02.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 Paket	175.000.000	12 Paket	200.000.000	12 Paket	200.000.000	12 Paket	200.000.000		
			01	01	02.06	05		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan		12 Paket	3.335.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01	01	02.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.800.000	12 Dokumen	10.800.000		
			01	01	02.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu		jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000		
			01	01	02.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000		
			01	01	02.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000		
			01	01	02.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD				1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000		
			03	**07**	**2.07**			**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7 unit	1.467.000.000	7 unit	2.130.000.000	7 unit	2.260.800.000	7 unit	2.260.800.000		
			03	07	2.07	01		Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah unit kendaraan perorangan dinas jabatan yang disediakan		1 unit roda empat	500.000.000	1 unit Kendaraan roda 4	500.000.000	1 unit Kendaraan roda 4	500.000.000	1 unit Kendaraan roda 4	500.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			03	07	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah unit krndaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		2 unit roda dua, 2 unit roda empat	310.000.000	4 unit Kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 3 dan 2 unit kendaraan roda 4 (Fasilitasi Mobil layanan Keliling dan Kendaraan Operasional Pelayanan Tera /Tera ulang	750.000.000	4 unit Kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 3 dan 2 unit kendaraan roda 4 (Fasilitasi Mobil layanan Keliling dan Kendaraan Operasional Pelayanan Tera /Tera ulang	900.000.000	4 unit Kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 3 dan 2 unit kendaraan roda 4 (Fasilitasi Mobil layanan Keliling dan Kendaraan Operasional Pelayanan Tera /Tera ulang	900.000.000		
			03	07	2.07	05		Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan		4 kursi pejabat, 100 kursi rapat	75.000.000	50 Kursi rapat, 10 Meja Rapat, 1 almari arsip,5 Kursi Pejabat	150.000.000	50 Kursi rapat, 10 Meja Rapat, 1 almari arsip, 5 Kursi Pejabat	155.000.000	50 Kursi rapat, 10 Meja Rapat, 1 almari arsip, 5 Kursi Pejabat	155.000.000		
			03	07	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		2 unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Komputer, 5 Printer, 2 LCD Proyektor, 1 Penghancur Kertas,10 finger Print, 2 Ipad, 1 mesin	182.000.000	2 unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Komputer, 5 Printer, 2 LCD Proyektor, 1 Penghancur Kertas,10 finger Print. 2 Ipad, 1 mesin	280.000.000	2 unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Komputer, 5 Printer, 2 LCD Proyektor, 1 Penghancur Kertas, 10 Finger Print, 2 Ipad, 1 mesin	330.000.000	2 unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Komputer, 5 Printer, 2 LCD Proyektor, 1 Penghancur Kertas, 10 Finger Print, 2 Ipad, 1 mesin	330.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												scanner		scanner		scanner		scanner			
			03	07	2.07	09		Penggadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 gedung arsip, 1 gedung,	300.000.000	1 Gedung Arsip	250.000.000	1 Gedung Arsip	165.800.000	1 Gedung Arsip	165.800.000		
			03	07	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				1Gudang	50.000.000	1Gudang	55.000.000	1Gudang	55.000.000		
			03	07	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 tempat parkir	100.000.000	1 Tempat Parkir dan 1 pos satpam	150.000.000	1 Tempat Parkir dan 1 pos satpam	155.000.000	1 Tempat Parkir dan 1 pos satpam	155.000.000		
			03	07	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 laporan	297.500.000	4 laporan	348.000.000	4 laporan	383.500.000	4 laporan	383.500.000		
			03	07	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1 laporan	2.500.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000		
			03	07	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	200.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	170.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			03	07	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000		
			03	07	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 Laporan	45.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000		
			03	01	2.09			**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah**		Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		**7 Unit**	**247.000.000**	**7 Unit**	**330.000.000**	**7 Unit**	**375.000.000**	**7 Unit**	**375.000.000**		
			03	07	2.09	01		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit Roda Empat	50.000.000	1 Unit Roda Empat	50.000.000	1 Unit Roda Empat	60.000.000	1 Unit Roda Empat	60.000.000		
			03	07	2.09	02		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		3 Unit Roda Tiga, 5 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua	50.000.000	3 Unit Roda Tiga, 5 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua	75.000.000	3 Unit Roda Tiga, 5 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua	75.000.000	3 Unit Roda Tiga, 5 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua	75.000.000		
			03	07	2.09	05		Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		30 Meja dan Kursi	7.000.000	50 Meja dan Kursi	10.000.000	50 Meja dan Kursi	10.000.000	50 Meja dan Kursi	10.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			03	07	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		15 Unit	20.000.000	20 Unit	25.000.000	25 Unit	30.000.000	25 Unit	30.000.000		
			03	07	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	60.000.000	2 Gedung	60.000.000		
			03	07	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		5 Sarana dan Prasana	60.000.000	5 Sarana dan Prasana	60.000.000	5 Sarana dan Prasana	70.000.000	5 Sarana dan Prasana	70.000.000		
			03	07	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		5 Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor	60.000.000	5 Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor	60.000.000	5 Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor	70.000.000	5 Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor	70.000.000		
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	03	07	16	46	46	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan industri yang disusun**		**33,3%**	**50,0%**	505.000.000	**57,0%**	**745.000.000**	**62,5%**	**945.000.000**	**62,5%**	2.195.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3	07	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota**		Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	**3 Dokumen**	**5 Dokumen**	505.000.000	**7 Dokumen**	**745.000.000**	**8 Dokumen**	**945.000.000**	**8 Dokumen**	945.000.000		
			3	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		jumlah dokumen rencana pembangunan industri				1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	180.000.000		
			3	07	02	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi,dan. Pelaksanaan kebijakan percepat pengembangan, penyebaran dan perwilayah industri		Jumlah Dokumen hasil koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		
								koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		1 Dokumen	120.000.000			1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000		
			3	07	02	2.01	04	Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		2 dokumen	95.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	105.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3	07	02	2.01	03	Koordinas, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000		
			3	07	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri		1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
			03	31	03			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri di SIINas**		**75,00%**	**77,00%**	**120.000.000**	**79,00%**	**130.000.000**	**80,00%**	**130.000.000**	**80,00%**	**380.000.000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			03	31	03	2.01		**Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	31 Dokumen	120.000.000	33 Dokumen	130.000.000	36 Dokumen	130.000.000	36 Dokumen	130.000.000		
			03	31	03	2.01	01	Fasilitisasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintregasi Dengan Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik		jumlah dokumen hasil fasilitas verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintergrasi dengan sistem OSS		30 Dokumen	65.000.000	32 Dokumen	70.000.000	35 Dokumen	70.000.000	35 Dokumen	70.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			03	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINNAS)		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri,perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota		1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000		
			03	31	04			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase Pengelolaan data dalam SIINas**		**20%**	**25%**	**225.000.000**	**25%**	**100.000.000**	**25%**	**240.000.000**	**25%**	**565.000.000**		
			03	31	04	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota**		Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	**1 Dokumen**	**5 Dokumen**	**225.000.000**	**4 Dokumen**	**100.000.000**	**5 Dokumen**	**240.000.000**	**5 Dokumen**	**240.000.000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			03	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis dataindustri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINas)		2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000		
			03	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas		1 Dokumen	125.000.000			1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000		
			03	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas		2 Dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	45.000.000		
			3	30				**Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**													
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Omzet Sektor Perdaga	30	02				**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan		90%	**90%**	**94.900.000**	**90%**	**103.890.000**	**90%**	**113.779.000**	**90%**	**312.569.000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ngan							ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan												
			30	02	2.01			**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan**		Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diproses	0	**2 Dokumen**	**5.000.000**	**2 Dokumen**	**5.000.000**	**2 Dokumen**	**5.000.000**	**2 dokumen**	**5.000.000**	Perdagangan	
			30	02	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan melalaui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	2 Dokumen	5.000.000	**2 Dokumen**	5.000.000	**2 Dokumen**	5.000.000	**2 dokumen**	5.000.000	Perdagangan	
			30	02	2.02			**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**		Prosentase penerbitan TDG		**90%**	**89.900.000**	**90%**	**98.890.000**	**90%**	**108.779.000**	**90%**	**108.779.000**	Perdagangan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	02	2.02	1		Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	26 Dokumen	26 Dokumen	89.900.000	27 Dokumen	98.890.000	27 Dokumen	108.779.000	27 Dokumen	108.779.000	Perdagangan	
			30	02	2.03			**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba dari waralaba Dalam Negeri**		**Jumlah Rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba dari waralaba Dalam Negeri**	**0**	**20**	**100000000**	**20**	**110000000**	**20**	**120000000**	**20**	**120000000**		
			30	02	2.03	01		fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	0	10	50.000.000,	10	55.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000		
			30	02	2.03	02		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah dokumen yang Diverifikasi sebagai pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri	0	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	02	2.04			**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar Negeri**		**Jumlah Rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri**	**0**	**2**	**10.000.000**	**2**	**10.000.000**	**2**	**10.000.000**	**2**	**10.000.000**		
			30	02	2.04	01		Sistem pelayanan perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri		Jumlah data dan Informasi sistem Pelayanan Perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
			30	02	2.04	2		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Jumlah dokumen yang diverifiasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	02	2.05			**Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat**		**Jumlah rekomendasi Teknis izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat**	**0**	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
			30	02	2.05	01		Fasilitasi Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlahsurat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
			30	**02**	**2.06**			**Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah monev Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**4 Laporan**	**50.000.000**	**4 Laporan**	**52.500.000**	**4 Laporan**	**55.250.000**	**4 Laporan**	**55.250.000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	02	2.06	01		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Penyimpanan bahan berbahaya	0	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000		
			30	02	2.06	02		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000		
			30	02	2.06	03		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelebelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0	10 Laporan	25.000.000	11 Laporan	27.500.000	12 Laporan	30.250.000	12 Laporan	30.250.000	Perdagangan	
			30	03				**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Omzet Perdagangan**			**1026miliyar**	**5.909.499.200**	**1089miliyar**	**6.770.000.000**	**1158mliyar**	**7.540.000.000**	**1158mliyar**	**20.219.499.200**		
			30	03	2.01			**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**7 unit**	**5.470.143.600**	**10 Unit**	**6.200.000.000**	**13 unit**	**5.900.000.000**	**11 unit**	**5.870.143.600**		
			30	03	2.01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		7 unit	5.470.143.600	8 unit	6.000.000.000	9 Unit	6.500.000.000	7 Unit	5.470.143.600		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	03	2.01	02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0	2 Unit	200.000.000	4 Unit	400.000.000	4 Unit	400.000.000		
			30	03	2.02			**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diwilayah Kerjanya**		**Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**35 Pasar**	**35 Pasar**	**439.355.600**	**35 Pasar**	**570.000.000**	**35 Pasar**	**640.000.000**	**35 Pasar**	**640.000.000**		
			30	03	2.02	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	439.355.600	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000		
			30	03	2.02	02		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000		
			30	04				**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk		**0,00%**	**95,84**	**260.936.600**	**96%**	**445.270.000**	**97%**	**600.000.000**	**97%**	**1.306.206.600**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	04	2.01			**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Ketersediaan barang pokok dan barang penting**	**0**	**4 Laporan**	**180.000.000**	**4 laporan**	**180.0000.000**	**4 Laporan**	**180.0000.000**	**4 Laporan**	**180.000.000**		
			30	04	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaann Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	0	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000		
			30	04	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pasar rakyat	0	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000		
			30	04	2.01	03		Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	04	2.02			**Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**4 laporan**	**4 laporan**	**222.973.200**	**4 laporan**	**245.270.000**	**4 laporan**	**300.000.000**	**4 laporan**	**300.000.000**		
			30	04	2.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	4 laporan	4 laporan	61.486.600	4 laporan	67.635.000	4 laporan	75.000.000	4 laporan	75.000.000		
			30	04	2.02	02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan pada sistem	0	4 laporan	61.486.600	4 laporan	67.635.000	4 laporan	75.000.000	4 laporan	75.000.000		
			30	04	2.02	03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	2 laporan	100.000.000	2 laporan	110.000.000	2 laporan	150.000.000	2 laporan	150.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	04	2.03			**Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**4 Laporan**	**299.175.000**	**4 Laporan**	**300.000.000**	**4 Laporan**	**300.000.000**	**4 Laporan**	**115.000.000**		
			30	04	2.03	01		Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0	4 Laporan	99.725.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000		
			30	04	2.03	02		Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	0	4 Laporan	99.725.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000		
			30	04	2.03	03		Pengawasan Penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan	99.725.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000		
			30	5				**Program Pengembangan Ekspor**	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor		**0,00%**	**60%**	**550.000.000**	**60%**	**550.000.000**	**60%**	**550.000.000**	**60%**	**1.650.000.000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	5	2.01			**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi**	**0**	**12**	**50.000.000**	**12**	**50.000.000**	**12**	**50.000.000**	**12**	**50.000.000**		
			30	5	2.01	01		Pembinaan dan pengembangan usaha produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha produk Ekspor Unggulan yang dibina	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
			30	5	2.01	02		Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
			30	5	2.01	03		Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang Lokal	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
			30	5	2.01	04		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
			30	5	2.01	05		Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pelatihan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
			30	5	2.01	06		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	06				**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku**		**62,33%**	**85,00%**	**250.000.000**	**85,55%**	**185.000.000**	**86,11%**	**160.000.000**	**86,11%**	**595.000.000**		
			30	6	2.01			**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,tera ulang dan Pengawasan**		**Jumlah Pelaksanaan Metrologi legal Beryupa tera/tera Ulang dan Pengawasan**	**10.000 UTTP**	**8.500 UTTP**	**250.000.000**	**8.555 UTTP**	**155.000.000**	**8.611 UTTP**	**160.000.000**	**8.611 UTTP**	**165.000.000**		
			30	6	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera ulang		Jumlah alat Ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera /tera ulang	9.597	8.500 UTTP	100.000.000	8.555 UTTP	125.000.000	8.611 UTTP	150.000.000	8.611 UTTP	150.000.000		
			30	6	2.01	02		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi legal yang dibina	120 Orang	120 Orang	150.000.000	150 orang	65.000.000	180 orang	70.000.000	180 orang	70.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	07				**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk**		**N/A %**	**51,94%**	**1.098.000.000**	**58,44%**	**1.375.000.000**	**61,04%**	**1.650.000.000**	**61,04%**	**4.123.000.000**		
			30	07	2.01			**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		**Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**40 UMKM**	**40 UMKM**	**1.098.000.000**	**45 UMKM**	**1.375.000.000**	**47 UMKM**	**1.650.000.000**	**47 UMKM**	**1.650.000.000**		
			30	07	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	0	40 UMKM	700.000.000	45 UMKM	800.000.000	47 UMKM	1.000.000.000	47 UMKM	1.000.000.000		
			30	07	2.01	02		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	45 UMKM	47 UMKM	298.000.000	50 UMKM	350.000.000	50 UMKM	400.000.000	50 UMKM	400.000.000		
			30	07	2.01	03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi sistem dan jaringan informasi Perdagangan	0	1 Dokumen	100.000.000		125.000.000	1 data	150.000.000	1 data	150.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTCOME	OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	07	2.01	03		Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan sandang Produksi dalam negeri		jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan sandang Produksi dalam negeri	0	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan tehadap peran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Adapun tujuan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah :

“Meningkatnya Produktifitas sektor Industri dan perdagangan”

Dengan indikator kinerja

1.Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Industri

2.Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Indikator :Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di kabupaten Nganjuk

   Alasan : Untuk Mengukur Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Nganjuk

Sumber Data : Bidang Perindustrian

Data dasar pada indicator ini Diperoleh dari Updating Data Tahun 2021

Yang dimaksud Industri Kecil Menengah di indicator ini adalah Industri Kecil menengah yang mempunyai Legalitas (ijin Usaha Industri)

Formula : Jumlah IKM Tahun n dikurangi Jumlah IKM tahun n-1 dibagi Jumlah IKM tahun n-1 dikali 100%

2. Indikator : Persentase Peningkatan Omzet sektor Perdagangan

Alasan : Untuk mengukur Peningkatan Omzet Sektor Perdagangan

Omzet Bidang Perdagangan diperoleh dari omzet Perdagangan Pasar rakyat (Pasar Tradisional) Pasar Tradisional di Kabupaten Nganjuk Terdiri dari 35 Pasar Rakyat (Tradisional)

Sumber data :Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Formula :

Jumlah omzet tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi n-1 dikali 100%

Indikator Kinerja utama dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel. 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2022	2024	2025	2026	
	2	3		4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan PDRB(ADHK) sektor industri	PDRB (ADHK) sektor Industri Tahun N-Tahun N-1 x100 PDRB (ADHK) sektor Industri Tahun N-1	%	11,70	11,80	11,90	12,00	12,00
2	Pertumbuhan PDRB(ADHK) sektor Perdagangan	PDRB (ADHK) sektor Perdagangan Tahun N-Tahun N-1 x100 PDRB (ADHK) sektor Perdagangan Tahun N-1	%	5,30	5,40	5,50	5,60	5,60
3	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N -tahun (N-1) x100 Jumlah industri kecil dan menengah tahun (N-1)	%	1,97%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%
4	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	Omzet sektor perdagangan tahun N – tahun (N-1) x100 Omzet Sektor Perdagangan Tahun (N-1)	%	6,0%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%

7.2 INDIKATOR KONERJA KUNCI

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. INDIKATOR KINERJA KUNCI

I. URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Indikator Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten

   Alasan : Untuk Mengukur tingkat Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nganjuk

   Sumber Data : Bidang Perindustrian (Nganjuk Dalam Angka)

   Formula :

   Jumlah industri tahun n - Jumlah industri tahun n-1 / jumlah industri tahun n-1 x100

   Klasifikasi Usaha industri Berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016)

Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000
Tenaga Kerja			
1-19 Orang	Industri Kecil (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
>=20 Orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

2. Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini

   Alasan : Untuk mengukur ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini.

   Sumber Data : Bidang Perindustrian

   Formula :

   Keterkinian informasi industri :

   a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)
   b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)
   c. Tidak menyampaikan informasi industri (0%)

d. Kelengkapan informasi industri meliputi :

e. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)

Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)

Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)

Keterangan

- Informasi Industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya
- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA

Alasan : Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan

a) naskah akademik (30%)
b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)
c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)
d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)
e) Penetapan Perda RPIK (10%)

Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK

E. URUSAN PERDAGANGAN

1. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Alasan untuk mengukur persentase kinerja realisasi pupuk

Sumber Data : Bidang Perdagangan

Formula :

Kinerja Realisasi Pupuk dibandingkan dengan RDKK dikali 100%

Keterangan

- Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.
- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

   Alasan untuk mengukur Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Sumber Data : Bidang Metrologi Legal

   Formula :

   Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n dibandingkan dengan jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten

   Keterangan

   - Yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang Metrologi Legal
   - Yang dimaksud dengan Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai
   - Yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keteranganketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang
   - berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera
   - Data yang dimasukkan seluruh data tera sah masih berlaku pada tahun pelaporan.
   - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya

   Alasan : Untuk Mengetahui Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan diwilayah kerjanya

   Data : Bidang Sarana Ditribusi Perdagangan

   Formula :

   Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya diperoleh dari Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan telah dilakukan sesuai Target waktunya (nilai 0,5) ditambah

Sarana Disribusi Perdagangan telah dimanfaatkan sesuai Peruntukannya (nilai 0,5) dikali 100%

4. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku

   Alasan : Untuk Mengetahui Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku

   Sumber Data : Bidang Metrologi Legal

   Formula :

   Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku diperoleh dari Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

No	Urusan Pemerintah		Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Perhitungan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
						2021	2024	2025	2026	
1			2	3		4	5	6	7	8
1	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – jumlah indsutri kecil dan menengah pada tahun n-1}}{\text{jumlah indsutri kecil dan menengah pada tahun n-1}}$	x100	0,95%	1,15%	1,35%	1,55%	1,55%
				a. Persetujuan draft raperda RPIK oleh gubernur provinsi (15%)						
				b. Penetapan perda RPIK (10%)						
				Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK						

		2	Tersediannya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Keterkinian informasi industri -tersediannya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) -tersediannya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) -tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2. kelengkapannya informasi industri meliputi : -informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) -informasi bahan baku dan bahan Formulasi Perhitungan		100%	100%	100%	100%	100%
				penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2)						
		3	Persentase	Realisasi	X100	93,97%	93,97%	93,97%	93,97%	93,97%

			kinerja realisasi pupuk	RDKK						
		4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	X100	53,32%	85,00%	85,55%	86.11%	86,11%
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan teraulang diwilayah kab. kota						
		5	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	K = (a+b) x100%		97%	100%	100%	100%	100%
				K= persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya						
				A = pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (Nilai 0,5)						
				B = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (Nilai 0,5)						

BAB VII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

NGANJUK, APRIL 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN NGANJUK



HARIS JATMIKO,S.PD,M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19711219 199803 1 006